



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026



**Disusun oleh :
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Awal Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 serta evaluasi Renja PD tahun lalu dan tahun berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Ranwal Rencana Kerja ditetapkan rencana capaian kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan disusunnya Ranwal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Pacitan, Juli 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN**



MUNIRUL ICHWAN, S.STP

Pembina Utama Muda

NIP19780528 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU.....	6
2.1. Hasil evaluasi Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	8
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	28
3.3. Program dan Kegiatan	31
3.4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	36
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	36
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD 2025.....	13
Tabel 2.2.	Reviu Terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026.....	22
Tabel 2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Pacitan.....	26
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.....	31
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Maju Tahun 2027.....	38

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Penetapan RKPD Tahun 2026 nomor 40 Tahun 2025 tanggal 10 Juli tahun 2025. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, tolok ukur kinerja pembangunan pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan dilakukan melalui pengukuran 5 indikator Sasaran yaitu :

1. Prosentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan
2. Prosentase Potensi Konflik yang dapat dicegah
3. Prosentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam bidang politik
4. Prosentase Ormas yang mendapat predikat
5. Hasil Nilai IKM PD

Dalam kontek perencanaan pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut untuk siap dan sanggup membuat / menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 didasarkan kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011); dan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016).

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Bab. V Ketentuan Peralihan Pasal 10.
22. Peraturan Bupati Pacitan No. 85 Tahun 2023 perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Cara Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
23. Perbup No. 043 tahun 2024 perubahan atas Perbup no. 92 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Pacitan
24. Penetapan RKPD Tahun 2026 nomor 40 Tahun 2025 tanggal 10 Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Adapun Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Pacitan, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, Proses penyusunan Renja PD, Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu (Tahun – 2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n – 1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.

3.2. Tujuan Dan Sasaran renja PD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan – catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan, penyusunan, pelaksanaan / pembinaan dan evaluasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu Kebijakan perencanaan program & kegiatan, Pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2026, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2026, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2026 ;

- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan sampai dengan akhir tahun 2025, sebagaimana tersebut tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja PD dan pencapaian renstra PD sampai dengan Tahun 2024, terlampir.

Dari tabel 2.1 tersebut, terlihat bahwa program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 Semester I terealisasi 46,78 dari yang ditargetkan pada tahun 2025. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang harus dicermati, yaitu :

- a) Efisiensi anggaran;
- b) Perencanaan yang kurang optimal, sehingga penyerapan anggaran yang dialokasikan tidak sesuai waktu yang dijadwalkan (kejar tayang di belakang); dan
- c) Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan, sehingga tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan dimasa akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparaturnya antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (*development*);
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Pacitan, memandang perlu untuk melaksanakan peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas personel ini.

Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pelaksanaan rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental serta latar belakang pendidikan yang memadai, yang ditunjang dengan mekanisme pendidikan dan pelatihan pegawai pada program Diklat Penjejaran maupun Diklat Fungsional Pemerintah Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana bidang Kesatuan Bangsa dan politik. Dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Edaran No. 050.12/7765/SJ Tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bahwa dalam menyusun Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tetap mengakomodir pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Pembinaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan Pengembangan etika serta budaya politik;
3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan juga memperhatikan Surat Edaran Menteri ini.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 Program RPJMD yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur dengan Indikator Hasil Nilai SAKIP PD
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, diukur dengan Indikator Prosentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya diukur dengan Indikator Prosentase pembinaan bidang sosial dan budaya.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial diukur dengan Indikator Prosentase potensi konflik yang ditangani.
5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya diukur dengan Indikator Prosentase Pembinaan terhadap Partai Politik.
6. Program Prosentase pembinaan terhadap Ormas diukur dengan Indikator Prosentase pembinaan terhadap Ormas.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s.d akhir Juni 2025

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(subo utput)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun (akhir periode RPJMD)	Realisasi Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi TW4 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)	Realisasi Kinerja dan anggaran RKPD s/d TW4(n-1)	Tingkat Capaian Kinerja & Ralisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
1	2				3	4	5		6	7		8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%	12	13
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	8	01			Kesatuan Bangsa dan Politik													
1	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0,00	0,00	2.321.694.973,00	1.742.666.349,00	75,06	1.742.666.349,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
						Hasil nilai SAKIP perangkat daerah	0,00	76,00	36	47,37	36,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1.1	8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	17.000.000,00	50.000.000,00	294,12	50.000.000,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	0,00	23	6	26,09	6,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1.1.1	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	17.000.000,00	50.000.000,00	294,12	50.000.000,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
						Renja,Renja Perubahan,Perjanjian Kinerja,Perjanjian Kinerja Perubahan,PPRG,RKA,RKA Perubahan,DPA, DPA Perubahan,LKJIP,Evaluasi Renja tribulan 1,Evaluasi Renja tribulan 2,Evaluasi Renja tribulan 3,Evaluasi Renja tribulan 4, Renaksi Pencapaian Kinerja,	0,00	12,00	5	41,67	5,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1.1.2	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	12,00	0	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					

1.2	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00		0,00		1.877.910.473,00		1.340.228.453,00		71,37		1.340.228.453,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah			0,00		59		24		40,68		24,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.2.1	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0,00		0,00		1.877.910.473,00		1.340.228.453,00		71,37		1.340.228.453,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		14		6		42,86		6,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.3	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00		0,00		0,00		29.455.000,00		0,00		29.455.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Prosentase pegawai yang mendapat layanan			0,00		100		48,3		48,30		48,30		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

1.3.1	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0,00		0,00		0,00		29.455.000,00		0,00		29.455.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai			0,00		1		1		100,00		1,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0,00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.4	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00		0,00		147.858.575,00		156.300.076,00		105,71		156.300.076,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Prosentase Operasional Dasar PD yang terpebuhi			0,00		100		40,3		40,30		40,30		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.4.1	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0,00		0,00		8.044.000,00		10.536.564,00		130,99		10.536.564,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah pengadaan komponen listrik/penerangan kantor			0,00		1		2		200,00		2,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0,00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.4.2	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0,00		0,00		33.414.575,00		23.015.800,00		68,88		23.015.800,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor			0,00		1		3		300,00		3,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0,00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.4.3	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0,00		0,00		20.732.000,00		20.277.621,00		97,81		20.277.621,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga			0,00		1		1		100,00		1,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0,00		0		0		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.4.4	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0,00		0,00		16.988.000,00		18.508.672,00		108,95		18.508.672,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah pengadaan logistik Kantor			0,00		1		3		300,00		3,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0,00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.4.5	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		0,00		0,00		19.220.000,00		11.600.000,00		60,35		11.600.000,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan		0,00		1		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0,00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.4.6	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00		0,00		49.460.000,00		72.361.419,00		146,30		72.361.419,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD		0,00		12		5		41,67		5,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

1.5	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00		0,00		11.188.800,00		10.500.000,00		93,84		10.500.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan		0,00		100		48,3		48,30		48,30		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.5.1	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0,00		0,00		11.188.800,00		10.500.000,00		93,84		10.500.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor		0,00		1		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0,00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.6	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00		0,00		212.122.500,00		120.678.270,00		56,89		120.678.270,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Oprasional Perangkat Daerah yang diibutuhkan		0,00		100		48,3		48,30		48,30		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.6.1	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0,00		0,00		1.100.000,00		1.300.000,00		118,18		1.300.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		0,00		12		6		50,00		6,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0,00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.6.2	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0,00		0,00		44.107.000,00		23.953.270,00		54,31		23.953.270,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah penyediaan jasa komunikasi dan listrik		0,00		12		5		41,67		5,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0,00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.6.3	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0,00		0,00		166.915.500,00		95.425.000,00		57,17		95.425.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

						Jumlah Aktivitas/Operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah		0.00		12		3		25,00		3,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0.00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.7	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00		0,00		55.614.625,00		35.504.550,00		63,84		35.504.550,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik		0.00		80		36.7		45,88		36,70		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.7.1	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0,00		0,00		45.849.625,00		32.079.550,00		69,97		32.079.550,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah pembayaran pajak, pemeliharaan roda dua dan roda empat,serta jumlah perjalanan dinas dalam daerah		0.00		1		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0.00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

1.7.2	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0,00	0,00	9.765.000,00	3.425.000,00	35,07	3.425.000,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor,bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung kantor	0,00	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	0,00	580.729.000,00	103.607.500,00	17,84	103.607.500,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
						Persentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	0,00	15.10	6.3	41,72	6,30	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
2.1	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0,00	0,00	580.729.000,00	103.607.500,00	17,84	103.607.500,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
						Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0,00	100	43.8	43,80	43,80	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
2.1.1	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,00	0,00	580.729.000,00	103.607.500,00	17,84	103.607.500,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
						Jumlah dokumen bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,00	4	3	75,00	3,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		0,00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
3		8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		0,00	0,00		1.176.000.000,00		1.195.962.073,00		101,70		1.195.962.073,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Persentase Pembinaan terhadap Partai Politik		0,00		100		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
3.1		8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman		0,00	0,00		1.176.000.000,00		1.195.962.073,00		101,70		1.195.962.073,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

							Tersusunnya Kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pem			0,00		100		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
3.1.1		8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di D			0,00		0,00		1.125.000.000,00		1.195.962.073,00		106,31		1.195.962.073,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah dokumen bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang			0,00		4		1		25,00		1,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			0,00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

3.1.2	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daer		0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik did		0,00	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemant		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.1.3	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dae		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

						Jumlah Peserta Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politi, Pemilihan Umum/ Pemilu Kepala daerah. Serta pemantauan situasi politik di daerah		0,00	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situas		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		0,00	0,00	174.836.000,00	92.384.000,00	52,84	92.384.000,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Persentase pembinaan terhadap Ormas		0,00	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

4.1		8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			0,00		0,00		174.836.000,00		92.384.000,00		52,84		92.384.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				0,00		100		0			0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4.1.1		8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			0,00		0,00		174.836.000,00		92.384.000,00		52,84		92.384.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah data Ormas yang dimutakhirkan dan fasilitasi bantuan Ormas				0,00		1		0,24		24,00		0,24			0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0,00		0		0		0,00		0,00			0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5		8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			0,00		0,00		60.414.000,00		7.710.000,00		12,76		7.710.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Prosentase Pembinaan bidang sosial dan budaya				0,00		100		42,1		42,10		42,10			0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5.1		8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			0,00		0,00		60.414.000,00		7.710.000,00		12,76		7.710.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Tersusunnya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				0,00		12,00		5		41,67		5,00			0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

5.1.1		8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0,00		0,00		60.414.000,00		7.710.000,00		12,76		7.710.000,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Dokumen Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerahjkan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Peny				0,00		3		0		0,00		0,00			0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		0,00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		0,00		0,00		3.076.736.000,00		1.268.382.000,00		41,22		1.268.382.000,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Persentase potensi konflik yang ditangani		0,00		100		56		56,00		56,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
6.1	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		0,00		0,00		3.076.736.000,00		1.268.382.000,00		41,22		1.268.382.000,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersusunnya Kebujakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangana Konflik Sosial		0,00		100		16		16,00		16,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
6.1.1	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		0,00		0,00		2.526.736.000,00		1.055.080.000,00		41,76		1.055.080.000,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Dokumen Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Terbatas antar negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		0,00		7		3		42,86		3,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
						Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pe		0,00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
6.1.2	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		0,00		0,00		550.000.000,00		213.302.000,00		38,78		213.302.000,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Rakor Forkopimda yang dilaksanakan		0,00		6		1		16,67		1,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		0,00		0		0		0,00		0,00		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Faktor internal pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan, yang merupakan kekuatan organisasi adalah adanya perundangundangan di bidang Keamanan Dan ketertiban, Keormasan / Organisasi yang merupakan sumber pelaksanaan kegiatan, adanya hubungan/ koordinasi antara satuan kerja yang cukup baik dan telah berkembangnya budaya kerja (motivasi kerja yang tinggi). Disisi lain kelemahan yang ada adalah adanya keterbatasan jumlah pegawai, terbatasnya sarana pendukung kerja yang memadai serta terbatasnya keterampilan, pengetahuan dan kemampuan personil.

Kondisi Eksternal yang cukup berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan yang merupakan peluang adalah adanya tuntutan organisasi yang selalu harus berkembang, adanya potensi daerah serta adanya dukungan satuan kerja lain dalam mendukung kelancaran tugas. Pada sisi ancaman/hambatan menghadapi perubahan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, adanya perubahan komitmen pihak-pihak penentu kebijakan serta adanya pengaruh kebijakan daerah sekitar. Setelah faktor- faktor internal dan eksternal dimaksud dianalisa dapat diketahui bahwa pencapaian Visi dan Misi dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman/hambatan yang ada.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, beberapa upaya meminimalisir kegagalan serta mengatasi kendala atau penyebab kegagalan sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja tahun mendatang, maka langkah-langkah yang diambil, antara lain:

- a. Lebih mengintensifkan adanya forum–forum/silaturahmi/ pembinaan kepada tokoh agama, masyarakat, pemuda, organisasi masyarakat, partai politik serta para generasi pemuda di Wilayah Kabupaten Madiun.
- b. Meningkatkan koordinasi / kerjasama di 4 pilar di tingkat Kabupaten / Kota, Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil Dan Tokoh Agama), Desa/Kel (Kades/Lurah, Babinkatibmas, Babinsa Dan Tokoh Agama) dalam mewujudkan Stabilitas Kemanan Wilayah Kabupaten Madiun;
- c. Membentuk FKDM Kabupaten Pacitan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kel serta meningkatkan sosialisasi deteksi dini terhadap stabilitas kemananan kepada masyarakat serta elemennya untuk menimbulkan kesadaran tentang Pamswakarsa;
- d. Pemantauan situasi wilayah Kabupaten Pacitan dalam cipta kondisi aman, dengan mengadakan patrol gabungan dengan instansi terkait.
- e. Pengawasan terhadap Faham Radikal dan Peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Pacitan.

- f. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan elemen masyarakat , Ormas, LSM, Parpol , Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Instansi terkait TNI/POLRI terhadap Penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Pacitan.
- g. Peningkatan SDM terkait Deteksi Dini terdapat Pencegahan, Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik yang timbul di Wilayah Kabupaten Pacitan.
- h. Meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat / elemen masyarakat dalam pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap konflik sosial di masyarakat Kabupaten Pacitan.
- i. Mengadakan Pengamanan bersama TNI/Polri dalam Deteksi Dini timbulnya konflik di masyarakat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun yang memuat daftar program dan Kegiatan Seluruh PD dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2026 telah disusun pada akhir bulan Juni 2025. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam rancangan awal RKPD terdapt 6 nomenklatur program yang dicantumkan dalam Renja Bakesbangpol, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Tabel 2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN PACITAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN	Kab. Pacitan	Hasil Nilai SAKIP PD	75,7	2.973.334.406,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN	Kab. Pacitan	Hasil Nilai SAKIP PD	75,7	2.973.334.406,00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	26.996.120,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	26.996.120,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan erangkat Daerah	22 Orang	2.203.757.236,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan erangkat Daerah	22 Orang	2.203.757.236,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pegawai yang mendapat layanan	100	28.466.438,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pegawai yang mendapat layanan	100	28.466.438,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	284.562.091,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	284.562.091,00	

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100	52.249.210,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100	52.249.210,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100	298.186.380,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan		298.186.380,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80	79.116.931,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik		79.116.931,00	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Pacitan	Persentase pelajar yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan (%)	17,29%	825.968.880,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase pelajar yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan (%)	17,29%	825.968.880,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	825.968.880,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	825.968.880,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Pacitan	Persentase edukasi politik terhadap masyarakat yang dilaksanakan (%)	100%	1.620.767.355,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase edukasi politik terhadap masyarakat yang dilaksanakan (%)	100%	1.620.767.355,00	
			Persentase Pembinaan terhadap Ormas dan Parpol	100%				Persentase Pembinaan terhadap Ormas dan Parpol	100%		

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah parpol yang berperan	9 Partai Politik	1.920.344.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah parpol yang berperan	9 Partai Politik	1.920.344.000	
			% peserta sosialisasi, FGD dan simulasi pendidikan politik	100%				% peserta sosialisasi, FGD dan simulasi pendidikan politik	100%		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Pacitan	Persentase Ormas yang berpredikat baik (%)	36,9%	103.375.102,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang berpredikat baik (%)	36,9%	103.375.102,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah ormas yang terdaftar	10 Ormas	103.375.102,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah ormas yang terdaftar	10 Ormas	103.375.102,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Pacitan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama dan sosial budaya (%)	100%	58.650.644,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama dan sosial budaya (%)	100%	58.650.644,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	58.650.644,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	58.650.644,00	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	Kab. Pacitan	Persentase Jaringan Intelijen yang terbentuk (%)	100%	1.987.680.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN		Persentase Jaringan Intelijen yang terbentuk (%)	100%	1.987.680.000,00	

	NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Persentase pemetaan daerah rawan konflik	100%				Persentase pemetaan daerah rawan konflik	100%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Laporan Kejadian	6 Laporan	1.987.680.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Laporan Kejadian	6 Laporan	1.987.680.000,00	
			Jumlah data potensi konflik yang sudah di klusterisasi	2 Data				Jumlah data potensi konflik yang sudah di klusterisasi	2 Data		

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dengan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan PD.

Bakesbangpol Kabupaten Pacitan sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2024 yang tertuang di dalam RKPD 2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Pacitan

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan		Hasil Nilai SAKIP PD	75,7	
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD</i>		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	23 Dokumen	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	23 Dokumen	
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	22 Orang	

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22 Orang	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase administrasi kepegawaian yang terfasilitasi	100 %	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 paket	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan administrasi umum sesuai ketentuan yang difasilitasi	100 %	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 paket	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 bulan	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah tepat waktu	12 Laporan	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyedia jasa penunjang operasional daerah yang terpenuhi	100 %	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 bulan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 bulan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80 %	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	21 Kendaraan	

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase pelajar yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan (%)	17,29%	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>		<i>Jumlah kegiatan yang dilaksanakan</i>	4 Kegiatan	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	4 dokumen	
	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka (Orang)	70 Orang	
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase edukasi politik terhadap masyarakat yang dilaksanakan (%)	100 %	
			Persentase Pembinaan terhadap Ormas dan Parpol	100%	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>		<i>Jumlah parpol yang berperan</i>	100 %	
			<i>% peserta sosialisasi, FGD dan simulasi pendidikan politik</i>	100%	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	4 dokumen	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	1.320 Orang	

	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang berpredikat baik (%)	36,9%	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>		Jumlah ormas yang terdaftar	10 Ormas	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1 Laporan	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama dan sosial budaya (%)	100%	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	485 Orang	
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Jaringan Intelijen yang terbentuk (%)	100 %	
			Persentase pemetaan daerah rawan konflik	100%	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>		Jumlah Laporan Kejadian	6 laporan	
			Jumlah data potensi konflik yang sudah di klusterisasi	2 Data	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	939 Orang	

	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 kali	

3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Timur 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Timur 2009–2014, RKPD Provinsi Jawa Timur 2012; dan RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Pacitan 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Tujuan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kerukunan dan Stabilitas Politik Daerah

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwawasan kebangsaan
2. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Politik
4. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik
Kabupaten Pacitan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pelayanan Prima yang baik dibidang kesbangpol		Indikator Tujuan : IKM minimal Baik	100	100	100	100	100	100

		Terwujudnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Optimal	Indikator Sasaran : Hasil Nilai IKM PD	83	83,77	86,35	87,18	88,15	89,13
2.	Menurunnya konflik sosial dan meningkatkan stabilitas politik di daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berwawasan kebangsaan	Indikator Tujuan : Jumlah Konflik Sosial	11,69	0	0	0	0	0
			Indikator Sasaran : Prosentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan		11,86	12,5	13,1	13,8	14,4
		Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat	Indikator Sasaran : Prosentase potensi konflik yang dapat dicegah		100	100	100	100	100
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Indikator Tujuan : Prosentase partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Indikator Sasaran : Prosentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam Bidang Politik.		12,7 %	15,4%	19,1%	23,6%	29,1%
			Indikator Sasaran : Prosentase Ormas yang mendapat predikat baik		28,4 %	30,7 %	32,9 %	35 %	36,9 %

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan Strategi dan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul, sebagaimana tersebut dalam analisa **SWOT** sebagai berikut:

1. Strategi S – O (Kekuatan – Peluang) ; memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang.
2. Strategi S – T (Kekuatan – Ancaman) ; menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
3. Strategi W – O (Kelemahan – Peluang) ; memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan.
4. Strategi W – T (Kelemahan – Ancaman) ; meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, maka dapat digambarkan faktor internal dan eksternal organisasi sangat berpengaruh serta faktor kunci keberhasilan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan tercermin dalam pendekatan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal Organisasi
 - a. Kekuatan (strenght)
 1. Adanya peraturan perundangan, petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja.
 2. Adanya kelembagaan yang mandiri dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi.
 3. Tersedianya anggaran dalam melaksanakan kinerja
 - b. Kelemahan (Weakness)
 1. Terbatasnya sarana dan prasarana
 2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas
 3. Koordinasi antar lembaga yang masih lemah
2. Faktor Lingkungan Eksternal Organisasi
 - a. Peluang (opportunities)
 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak nya untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Adanya dukungan program dari pusat maupun propinsi
 3. Adanya tuntutan Keamanan sebagai kebutuhan dasar.
- b. Ancaman (threats)
1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
 2. Laju Perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan semakin kompleks tidak sebanding usaha pencegahan, pemulihan keamanan masyarakat.
 3. Jumlah penduduk yang semakin bertambah memicu peningkatan Instabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten pacitan.

MATRIK ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR <i>INTERNAL</i> <i>FAKTOR EKSTERNAL</i>	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Adanya peraturan perundangan, petunjuk teknis, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja pada BakesbangPol. 2. Adanya kelembagaan yang mandiri dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi pada BakesbangPol. 3. Tersedianya anggaran dalam melaksanakan kinerja pada BakesbangPol.	1. Terbatasnya sarana dan prasarana pada BakesbangPol. 2. Kuantitas dan Kualitas SDM yang terbatas pada BakesbangPol. 3. Koordinasi antar lembaga yang masih lemah pada BakesbangPol.
PELUANG (OPPORTUNITIES)	SO	WO
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak nya untuk mendapatkan	1. Dengan adanya Peraturan perundangan Pada BakesbangPol dapat meningkatkan	1. Masyarakat sadar atas haknya untuk menjaga keamanan dan ketertiban walaupun Dengan

keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat 2. Adanya dukungan program baik dari pusat maupun propinsi 3. Adanya tuntutan Keamanan sebagai kebutuhan dasar	Kewaspadaan Dini dimasyarakat . 2. Adanya kelembagaan yang mandiri dilengkapi dengan tugas dan fungsi pada BakesbangPol Merealisasikan tuntutan kemanan dan ketertiban sebagai kebutuhan dasar 3. Adanya anggaran pada Bakesbang pol dapat merealisasikan program baik dari pusat maupun Propinsi	sarana yang terbatas pada BakesbangPol. 2. Tuntutan keamanan sebagai kebutuhan dasar dapat terwujud meskipun keterbatasan SDM pada BakesbangPol . 3. Adanya dukungan dari propinsi dan pusat dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga yang masih lemah pada BakesbangPol.
<i>ANCAMAN (THREATS)</i>	<i>ST</i>	<i>WT</i>
1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban 2. Laju Perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan semakin komplek tidak sebanding usaha pencegahan, pemulihan keamanan masyarakat. 3. Jumlah penduduk yang semakin	1. Adanya peraturan perundangan dan petunjuk teknis pada Badan Kesbang pol dapat menekan masyarakat yang kurang menyadari tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. 2. Tersedianya anggaran pada Badan Kesbang pol untuk kegiatan pengamanan dapat menghambat laju perkembangan sosial yang semakin komplek 3. Kelembagaan mandiri yang dilengkapi tugas pokok dan	4. Sarana dan prasaran yang terbatas pada BakesbangPol apabila dioptimalkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakan akan kemanan dan ketertiban. 5. Sumber daya manusia yang masih terbatas pada BakesbangPol apabila dipotimalkan dapat mencegah laju perkembangan

bertambah memicu peningkatan Instabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten pacitan.	fungsi pada Badan Kesbang pol yang jelas dapat menekan instabilitas keamanan dan ketertiban seiring dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah.	kehidupan sosial kemasyarakatan yang semakin kompleks 6. Koordinasi pada BakesbangPol tentang keamanan dan ketertiban apabila ditingkatkan dapat mengurangi peningkatan instabilitas.
---	--	--

3.4 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dari pengalaman pelaksanaan tugas sampai saat ini, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan maupun hambatan dalam pelaksanaan program / kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dirumuskan melalui :

3.4.1 Kebijakan

Kebijakan merupakan strategi yang di dalamnya berisi kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi dilaksanakan, juga mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan serta mengarahkan pada kondisi dimana setiap pelaksana di organisasi apakah memperoleh dukungan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran pada badan kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.
2. Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.
3. Pelaporan tepat waktu efektif, efisien, transparan dan akuntabel
4. Pelatihan bagi aparatur untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan

5. Koordinasi dan komunikasi yg aktif antar instansi terkait dengan lembaga keagamaan dan kepercayaan
6. Melibatkan masyarakat dalam menentukan metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi
7. Peningkatan pembinaan lembaga non pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam pemantauan keberadaan parpol
9. Peningkatan operasional Tim Terpadu
10. Peningkatan operasional penanganan gangguan keamanan dalam negeri

3.4.2 Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program merupakan rencana tindak (action plan) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran.

sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan pngembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

RENCANA KERJA TAHUN 2026

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan serta guna mencapai sasaran yang dituju maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 sebagaimana terlampir di bawah ini :

Tabel 3.3
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RANCANGAN AWAL

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

PERANGKAT DAERAH : 40506 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8 0 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)		75,7	2.973.334.406,00				3.122.001.000,00
8 0 1 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		23 Dokumen	26.996.120,00	PAD		23 Dokumen	28.345.926,00,-
8 0 1 1 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		12 bulan	26.996.120,00			23 Dokumen	28.345.926,00
8 0 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan		22	2.203.757.236,00			22	2.313.944.972,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Tunjangan ASN (Orang/bulan)							
8	0	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		22	2.203.757.236,00			14 bulan	2.313.944.972,00
8	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase administrasi kepegawaian yang terfasilitasi		100%	28.466.438,00			100%	29.889.760,00
8	0	0	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		1 paket	28.466.438,00			1 paket	29.889.760,00
8	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum sesuai ketentuan yang difasilitasi		100%	284.562.091,00			100%	298.790.196,00
8	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1 paket	16.015.007,00			1 paket	16.815.757,00
8	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1 paket	49.504.847,00			1 paket	51.980.090,00
8	0	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1 paket	34.129.283,00			1 paket	35.835.747,00
8	0	0	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1 paket	42.194.318,00			1 paket	44.304.034,00
8	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1 paket	44.493.836,00			1 paket	46.718.528,00
8	0	0	2.0	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12 bulan	98.224.800,00			12 bulan	103.136.040,00
8	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah laporan barang milik daerah tepat waktu		12	52.249.210,00			12	54.861.670,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pemerintah Daerah								
8	0	0	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	-			-	-
8	0	0	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	52.249.210,00			1	54.861.670,00
8	0	0	2.0		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyedia jasa penunjang operasional daerah yang terpenuhi		100%	298.186.380,00			100%	313.095.700,00
8	0	0	2.0	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	3.891.390,00			12 bulan	4.085.960,00
8	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12 bulan	69.863.880,00			12 bulan	73.357.074,00
8	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12 bulan	224.431.110,00			12 bulan	235.652.666,00
8	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		80%	79.116.931,00			80%	83.072.776,00
8	0	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		21	60.849.428,00			1 tahun	63.891.898,00
8	0	0	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		1 paket	18.267.503,00			1 paket	19.180.878,00

KODE					URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATAT AN PENTI NG	RENCANA TAHUN 2027	
							LOK ASI	TARG ET CAPAI AN KINER JA	KEBUTUH AN DANA/ PAGU INDIKATI F	SUMB ER DANA		TARG ET CAPAI AN KINER JA	KEBUTUH AN DANA/ PAGU INDIKATI F
(1)			(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)							
8	0	0			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelajar yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan (%)		17,29%	825.968.880,00			16,73	867.267.000,00
8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		4	825.968.880,00			100%	867.267.000,00
8	0	0	2.0	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)		4 Dokumen	93.593.758,00			4 Dokumen	109.922.000,00
8	0	0	2.0	00	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (Orang)		70	732.375.122,00			70	757.345.000,00
8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	Persentase edukasi politik terhadap masyarakat yang dilaksanakan (%)		100	1.620.767.355,00			100	1.701.806.000,00
					MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pembinaan terhadap Ormas dan Parpol		100				100	
8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah parpol yang berperan		9 Partai Politik	1.576.986.355,00			9 Partai Politik	1.655.347.755,00
						% peserta sosialisasi, FGD dan simulasi pendidikan politik		100%	43.781.000,00				46.458.245,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
8	0	0	2.0	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)		4 dokumen	1.576.986.355,00			4 dokumen	1.655.347.755,00
8	0	0	2.0	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		1.320	43.781.000,00			1.320	28.958.245,00
8	0	0	2.0	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan		-	0,-			27	17.500.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
8	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang berpredikat baik (%)		36,9	103.375.102,00			38,7	108.544.000,00
8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terdaftar		10 Ormas	103.375.102,00			10 Ormas	108.544.000,00
8	0	0	2.0	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)		1 Dokumen	103.375.102,00			1 Dokumen	108.544.000,00
8	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama dan sosial budaya (%)		100%	58.650.644,00			100%	61.583.000,00
8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		3 Kegiatan	58.650.644,00			3 Kegiatan	61.583.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Ekonomi, Sosial dan Budaya								
8	0	0	2.0	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		485 orang	58.650.644,00			500 orang	61.583.000,00
8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Jaringan Intelijen yang terbentuk (%)		100%	1.987.680.000,00			100	2.087.064.000,00
						Persentase pemetaan daerah rawan konflik		100%	1.987.680.000,00			100%	2.087.064.000,00
8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		6 Laporan	1.987.680.000,00			6 Laporan	2.087.064.000,00
8	0	0	2.0	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		939	1.287.680.000,00			986	1.014.064.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	0	0	1.0	00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		-	0,-			350 Orang	333.000.000
8	0	0	2.0	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	700.000.000,00			1	740.000.000,00

5

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun dan merupakan tindak lanjut dari implementasi Renstra tersebut.

Dengan adanya Renja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahun 2026 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pacitan dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026.

Pacitan, Juli 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN**



MUNIIRUL ICHWAN, S.STP

Pembina Utama Muda

NIP. 19780528 199810 1 001